

Meninjau Akuntabilitas Keuangan Desa dari Sudut Pandang Kompetensi Aparatur dan Sistem Pengelolaan: *Systematic Literature Review*

Nabila Khairunnisa Ahmad^{1*}, Maria Bianca Cheravine², Afifah Alya Zulaikha³, Novi Karsa Pratiwi⁴, Rika Henda Safitri⁵.

¹Universitas Sriwijaya, Palembang, Indonesia

Email: 01031282429049@student.unsri.ac.id

²Universitas Sriwijaya, Palembang, Indonesia

Email: 01031182429033@student.unsri.ac.id

³Universitas Sriwijaya, Palembang, Indonesia

Email: 01031382429183@student.unsri.ac.id

⁴Universitas Sriwijaya, Palembang, Indonesia

Email: 01031282429123@student.unsri.ac.id

⁵Universitas Sriwijaya, Palembang, Indonesia

Email: rikahenda@unsri.ac.id

***Corresponding Author:** Nabila Khairunnisa Ahmad

Abstract: Fund allocations often increase as needs grow, and village management demands greater accountability due to these increased allocations. However, there are gaps in the competence of village officials and in system optimization that need to be addressed. This study employs a Systematic Literature Review method, analyzing 15 prior articles from the 2020–2025 period. The findings indicate that consistent improvements in the application of accounting standards and relatively rapid reporting can be achieved through the practical implementation of the Village Financial System (SISKEUDS). Financial literacy and moral integrity are the primary determining factors that can fulfill the accountability process as a means of ensuring the quality of informative information. Some reports still face technical challenges in achieving transparency, which poses a barrier within the scope of public accessibility. Thus, to realize village finances with high accountability, two main components that are well correlated are required: the intellectual strengthening of village officials and the massive utilization of technology. This study can indirectly contribute to decision-making regarding digital transformation efforts in rural areas.

Keywords: Accountability, Apparatus Competence, Village Financial System, Village Finance.

Abstrak: Pengalokasian dana sering kali bertambah seiring dengan semakin banyaknya kebutuhan yang diperlukan, begitupun dengan pengelolaan desa yang menuntut akuntabilitas yang lebih tinggi dikarenakan adanya penambahan alokasi biaya. Akan tetapi, terdapat kesenjangan berupa kompetensi aparatur dan juga optimalisasi sistem yang perlu ditindak lanjuti. Studi menggunakan metode Systematic Literature Review dengan menganalisis 15 artikel terdahulu dalam rentang waktu 2020-2025. Temuan ini menunjukkan jika peningkatan yang dialami secara konsistensi terhadap penerapan standar akuntansi serta pelaporan yang relatif cepat dapat dicapai dengan adanya implementasi secara nyata menggunakan Sistem

Kuangan Desa (SISKEUDES). Faktor literasi keuangan dan juga integritas moral menjadi faktor penentu utama yang dapat memenuhi proses akuntabilitas sebagai bentuk pemenuhan kualitas informasi yang informatif. Sebagian laporan masih sulit untuk melakukan transparansi secara teknis, hal ini menjadi kendala dalam ruang lingkup aksesibilitas publik. Dengan demikian, dalam mewujudkan keuangan desa dengan akuntabilitas yang tinggi, memerlukan dua komponen utama yang saling berkorelasi dengan baik, yakni adanya bentuk penguatan secara intelektual pada sumber daya aparatur desa dan pemanfaatan teknologi secara masif. Studi ini dapat memberikan kontribusi secara tidak langsung dalam pengambilan keputusan terkait upaya transformasi digital pada pedesaan.

Kata Kunci: Akuntabilitas, Kompetensi Aparatur, Sistem Keuangan Desa, Keuangan Desa.

PENDAHULUAN

Dalam mengelola keuangan, diperlukan laporan yang jelas mengenai alur kas terkait dengan keuangan tersebut. Ketentuan ini berlaku tidak hanya bagi beberapa aktor ataupun organisasi namun, laporan yang jelas untuk memberikan informasi mengenai alur kas keuangan merupakan keharusan yang dapat diikuti oleh berbagai organisasi, lembaga, wilayah, bahkan desa. Semenjak Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 mengenai desa diberlakukan, adapun satu sektor yang menjadi titik fokus utama dalam tata kelola pemerintahan yakni adalah pengelolaan keuangan desa (Pramesti et al., 2023). Adanya tuntutan mengenai standar profesionalisme, transparansi serta akuntabilitas yang tinggi menjadi sebuah konsekuensi ketika dikelola secara mandiri oleh pemerintah desa, dimana disebabkan oleh adanya implementasi dari kebijakan tersebut yang belum terkoordinasi dengan baik (Ardelia & Handayani, 2022).

Secara nyata dalam pengelolaan dana keuangan terdapat kendala yang cukup signifikan, berupa kesenjangan antara besaran anggaran yang diberikan dengan tingkat kemampuan yang dimiliki oleh administrasi hingga kualitas dari Sumber Daya Manusia. Adanya proses pelaporan yang tidak terkoordinasi dengan baik menyebabkan terjadinya keterlambatan dalam mempertanggung jawabkan laporan. Melalui kondisi yang selalu menunjukkan ketidaksiapan dalam melakukan transparansi pada laporan keuangan, dapat menimbulkan risiko baik secara internal maupun sosial (Rahmasari, 2020). Seperti adanya anggaran yang menyimpang atau tidak diketahui tujuannya dan menurunnya kredibilitas masyarakat mengenai proses pengelolaan yang dibawa oleh desa yang bersangkutan.

Kemajuan teknologi mendorong pemanfaatannya untuk sektor yang membutuhkan media agar pengelolaan yang diharapkan dapat bekerja secara optimal. Pada sistem pengelolaan keuangan desa, sebagian besar telah dikenalkan dengan aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES). Aplikasi siskeudes diharapkan dapat menjadi sebagai jembatan untuk para pengurus keuangan di daerah untuk mengoptimalkan pelaporan serta memiliki data yang terintegrasi dengan baik. Dibalik keinginan siskeudes untuk mencapai tujuan utama bagi warga desa, didapati beberapa kendala yang harus diatasi sebelum penerapan siskeudes yakni mengenai sumber daya yang akan menggunakannya secara langsung. Dalam pemanfaatan siskeudes pada pengelolaan desa, tentunya tidak semua wilayah desa sudah mengerti terkait dengan pemanfaatan siskeudes di daerahnya. Tidak hanya bagi masyarakat, siskeudes juga menjadi sebuah inovasi dalam pemanfaatan teknologi terlebih lagi bagi pengurus kepentingan.

Selain latar belakang yang melandasi kepenulisan ini, adapun beberapa rumusan masalah yang akan dipenuhi dalam kepenulisan ini. Pertama, Bagaimana literatur menilai kepatuhan pemerintah desa terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dalam mewujudkan akuntabilitas? Kedua, Antara Kualitas SDM (Kompetensi) dan Ketaatan Prosedur (Sistem Pengelolaan), komponen mana yang lebih dominan dalam menentukan

kualitas laporan keuangan desa? Ketiga dan yang terakhir, Apakah sistem pengelolaan keuangan saat ini lebih banyak menghasilkan akuntabilitas yang bersifat sekadar memenuhi kewajiban laporan mencerminkan kondisi keuangan yang sebenarnya?

Lalu, pembahasan mengenai upaya penguatan tata kelola keuangan entitas publik telah banyak dikaji oleh beberapa studi terdahulu terlebih lagi mengenai pengaruh kompetensi dan upaya penerapan sistem informasi dalam meningkatkan keluaran laporan keuangan. Adapun kajian pertama yang melakukan eksplorasi pada implementasi siskeudes yang berfokus pada struktur data. Studi ini hanya berfokus pada struktur data yang digunakan dalam sistem yang menjadi media penelitian, sehingga tidak membahas secara langsung keterkaitan antar variabel yang dapat mendukung kemajuan hasil laporan keuangan (Saputra & Novitasari, 2025). Sistem pengendalian internal menggunakan kerangka kerja COSO menjadi fokus penelitian pada studi selanjutnya, Dimana hasil menunjukkan jika dalam proses pengendalian internal, dapat mengalami keterlambatan apabila pemerintah desa memiliki pemahaman yang relatif lemah sehingga dapat berdampak pula terhadap perwujudan pengelolaan desa yang efektif (Handiyono & Lutfi, 2020). Uji secara kuantitatif terhadap dua variabel yang mempengaruhi aksesibilitas terhadap laporan keuangan yakni kompetensi pemerintah desa serta aksesibilitas laporan keuangan, selain dari dua komponen tersebut, terdapat komponen lainnya yang lebih unggul untuk memberikan pengaruh atau dampak yang cukup signifikan pada akuntabilitas, yakni kompetensi serta upaya pengendalian internal yang lebih berpengaruh sesuai hasil studi (Puspa & Prasetyo, 2020).

Adapun tujuan utama dari penelitian ini ialah untuk mengidentifikasi secara luas terkait dengan faktor penentu yang dapat meningkatkan kualitas dan menghindari Risiko dalam proses pengelolaan keuangan hingga pelaporan. Berdasarkan berbagai penelitian terdahulu, didapati berbagai kendala utama yang membuka celah penelitian untuk penelitian ini, yakni minimnya pembahasan mengenai penerapan sistem yang digunakan secara nyata pada beberapa wilayah untuk mendukung kemajuan dalam menyajikan laporan keuangan, hingga konsistensi penggunaan yang mendukung penerapan peraturan mengenai tata cara mengelola laporan keuangan, baik dalam beberapa wilayah atau bahkan masuk dalam skala nasional.

Untuk mengisi celah penelitian tersebut, penerapan metode *Systematic Literature Review* (SLR) pada penelitian ini akan mengkaji secara dalam melalui 15 artikel yang sudah melewati pemilihan ketat melalui protokol dan tahapan yang ada pada PRISMA. Studi ini akan menyajikan berbagai faktor pendukung bahkan penghambat yang dapat dijadikan acuan bagi pengembangan sistem digitalisasi pelaporan keuangan desa agar dapat terus berinovasi dan juga mengedepankan informasi yang transparansi dan terpercaya.

Adapun keterbaruan dari penelitian ini ialah dengan memberikan pendekatan pada sistem keuangan desa melalui uji efektivitas serta meninjau aspek literasi hingga fungsi dari audit internal kepemimpinan desa. Perspektif terkait sistem informasi yang dapat memberikan pengaruh yang lebih stabil untuk menyajikan laporan keuangan yang lebih berkualitas akan menjadi sudut pandang baru yang akan ditemukan pada studi ini. Besar harapan kajian ini akan berdampak secara signifikan melalui hasil analisis penerapan mengenai sistem keuangan desa melalui faktor-faktor hingga keluaran dari penggunaan sistem untuk berbagai daerah, sehingga dapat menjadi media informasi untuk sebagian wilayah atau desa yang membutuhkan informasi atau inovasi dari sistem keuangan desa.

METODE PENELITIAN

Proses pengkajian yang dimulai dengan mencari sumber data yang relevan sesuai dengan kata kunci dan juga memenuhi kriteria yang dibutuhkan, berbagai sumber yang didapati secara langsung memerlukan tinjauan agar secara lengkap membahas hal yang relevan mengenai topik yang dibahas sehingga penelitian ini berbasis kepustakaan dengan

mengadopsi pendekatan *Systematic Literatur Review* (SLR) untuk menghasilkan studi yang kaya akan informasi dan hasil kajian yang kredibel (Simamora et al., 2024). Dalam melakukan penyaringan artikel agar didapati hasil penelitian yang konkrit dan sesuai dengan kriteria pembahasan, penerapan protokol PRISMA (*Preferred Reporting Items for Systematic reviews and Meta-Analyses*) yang merupakan sebuah standar pedoman yang diberikan untuk meningkatkan kualitas laporan tinjauan sistematis. Yang dimana PRISMA bertujuan untuk membawa pengaruh positif terkait proses penyaringan artikel sebab dapat memberikan informasi secara transparan mengenai kualitas proses dengan divisualisasikan melalui diagram alir yang melengkapi gambaran proses penyeleksian artikel (Kahale et al., 2021).

Penelitian ini menggunakan dua kata kunci pada dua mesin pencari sumber data yang berbeda. Penerapan kata kunci “Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Daerah AND Kualitas Laporan Keuangan” dan mengatur rentang waktu pada enam tahun terakhir yakni 2020-2026 digunakan sebagai tujuan untuk melakukan filterisasi pada keluaran mesin pencarian artikel, supaya semua artikel yang keluar sesuai dengan tema serta topik yang akan dibahas pada studi.

Kriteria Pemilihan Artikel

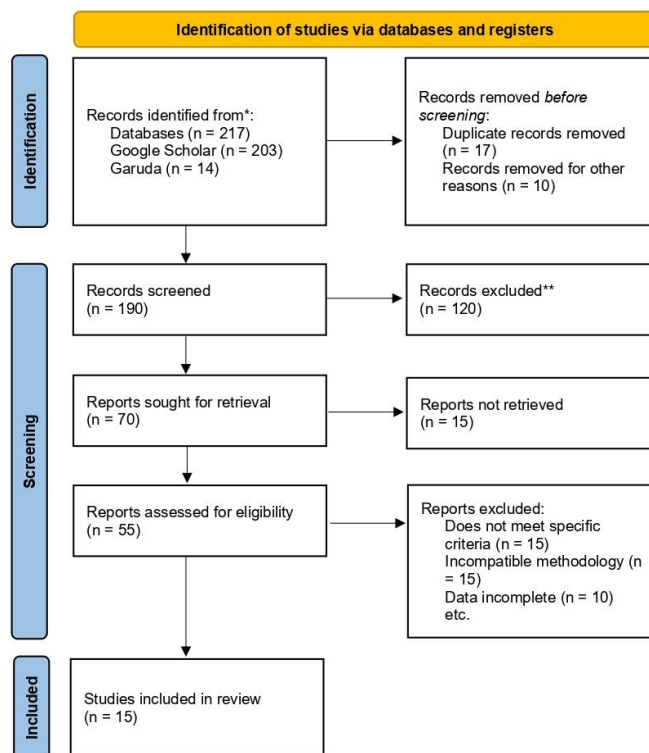
Adanya titik fokus mengenai Akuntansi, Kompetensi, dan Sistem Pengelolaan, yang diterapkan, adapun beberapa kriteria ketat mengenai pemilihan artikel untuk memudahkan tahapan penyaringan. Semua artikel yang tidak memenuhi kriteria pada tabel 1, tidak akan dimasukkan dalam analisis literatur.

Tabel 1.
Kriteria Pemilihan Artikel Penelitian

Kriteria	Inklusi (Diterima)	Eksklusi (Ditolak)
Rentang Waktu	Artikel yang dipublikasikan dalam kurun waktu 10 tahun terakhir (2016–2026).	Artikel yang terbit sebelum tahun 2016 (sebelum implementasi penuh UU Desa No. 6/2014).
Jenis Literatur	Jurnal ilmiah nasional/internasional yang telah melalui proses peer-review.	Skripsi, Tesis, Disertasi, Prosiding seminar yang tidak lengkap, atau artikel berita/opini.
Subjek Penelitian	Fokus pada Pemerintah Desa di Indonesia.	Fokus pada Pemerintah Daerah (Kabupaten/Kota), BUMN, atau organisasi swasta.
Topik & Variabel	Membahas minimal dua variabel: Akuntabilitas Keuangan Desa, Kompetensi Aparatur, atau Sistem Pengelolaan Keuangan.	Hanya membahas korupsi desa secara umum tanpa meninjau aspek kompetensi akuntansi atau sistemnya.
Metode Penelitian	Menggunakan metode Kuantitatif, Kualitatif, atau Mixed Methods.	Artikel yang hanya berupa review buku atau esai pendek tanpa metodologi penelitian yang jelas.
Bahasa	Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.	Bahasa selain Indonesia dan Inggris.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Melalui pencarian yang dilakukan menggunakan dua sumber data yang berbeda, yakni google scholar dan juga garuda, sebagai tahapan awal pencarian artikel, didapatkan sebanyak 203 artikel dari sumber data Google Scholar dan 14 artikel yang berasal dari garuda. dari kedua hasil sumber data tersebut, total keseluruhan artikel setelah di kalkulasikan berjumlah 217. akan tetapi, sifat dari data yang didapatkan ini masih bersifat mentah, sehingga diperlukan berbagai tahapan untuk mengolah data ini menjadi data yang siap untuk di analisis.



Sumber: Peneliti

Gambar 1. Diagram Alir PRISMA

Olah data yang dihasilkan akan dilanjutkan dengan keempat tahapan yang sesuai dengan protokol PRISMA. proses analisis artikel dengan tahapan sesuai ketentuan PRISMA akan membantu dalam menemukan jumlah artikel yang relevan dan artikel yang benar-benar sesuai dengan cakupan penulisan secara lengkap. untuk alur analisis menggunakan PRISMA dapat dilihat melalui gambar yang disajikan pada gambar 1.

Tahapan awal merupakan tahap identifikasi yang merupakan tahapan artikel dari dua sumber data yang berbeda, terdapat data mentah sebanyak 217, artikel-artikel tersebut pada tahapan ini terdapat beberapa artikel yang di eliminasi, artikel yang terduplikasi sebanyak 17 dan artikel yang otomatis dihapus oleh mesin pencarian 10 sehingga dari dua alasan tersebut pada tahapan ini terdapat 27 artikel yang di eliminasi. dari jumlah artikel awal, pada tahapan identifikasi tersisa 190 yang dapat lanjut ke tahapan penyaringan. Pada tahapan ini, artikel akan di analisis sesuai dengan judul dan abstrak. penyaringan secara menyeluruh pada 190 artikel yang masuk pada tahapan penyaringan akan dianalisis sesuai kesesuaian judul dan abstrak yang berada dalam kategori kriteria yang telah ditentukan. berdasarkan hasil penyaringan, terdapat 120 artikel yang dinyatakan tidak relevan secara segi judul dan abstrak sehingga dikeluarkan pada tahapan ini. Akan tetapi terdapat 15 artikel yang dikeluarkan karena tidak dapat diakses secara keseluruhan. Sehingga, tersisa sebanyak 55 artikel yang akan lanjut pada tahapan berikutnya.

Tahap uji kelayakan yang merupakan lanjutan dari tahapan penyaringan dilakukan dengan cara membaca secara keseluruhan isi dari artikel. pada bagian ini, terdapat 15 yang dikeluarkan dikarenakan secara keseluruhan cakupan pembahasannya tidak sesuai dengan kriteria. lalu, sebanyak 15 dikeluarkan karena tidak tersedia keseluruhan isi dari artikel terpilih, selain itu terdapat 10 artikel yang dikeluarkan karena data yang dimiliki oleh artikel tidak lengkap. Sehingga pada uji kelayakan terdapat 40 artikel yang dikeluarkan. sehingga dari tahapan ini didapatkan sebanyak 15 yang dipertahankan. sehingga tahapan akhir dari

proses ini mendapatkan hasil sebanyak 15 artikel dengan kesesuaian kriteria yang telah ditentukan dan siap untuk di analisis lebih lanjut dan dapat menjawab rumusan masalah yang telah ditentukan

Tabel 2.
Analisis Konsistensi Standar Akuntansi

Penulis & Tahun	Standar/Regulasi yang Dirujuk	Temuan Kepatuhan Akuntansi	Kendala Penerapan Standar
(Halid et al., 2025)	Regulasi Dana Desa & Standar Laporan	Akuntabilitas dominan pada pemenuhan administrasi formal.	Keterbatasan kompetensi teknis akuntansi substansif.
(Aulia et al., 2026)	UU Desa & Regulasi BPK	Terjebak pada pemenuhan kewajiban administratif-formalistik.	Ketidakpatuhan regulasi dan temuan manipulasi bukti.
(Temalagi et al., 2022)	Prinsip Akuntansi & Pelaporan Desa	Keterlambatan pelaporan akibat transisi data manual.	Ketidakmampuan operasional fitur standar akuntansi.
(Gusasi & Lantowa, 2021)	Permendagri 113/2014 & 20/2018	Pengelolaan sesuai prosedur dan prinsip ketaatan.	Kurangnya pemahaman teknis di luar aplikasi.
(Bawansel et al., 2025)	Permendagri 20/2018	Pencatatan sesuai struktur dan klasifikasi anggaran.	Ketergantungan tinggi pada koneksi internet (sinkronisasi).
(Utami et al., 2023)	Permendagri 113/2014 & 20/2018	Memenuhi prinsip ketaatan hukum penatausahaan.	Perlunya evaluasi fitur aplikasi agar lebih user-friendly.
(Elfirar & Putri, 2024)	Permendagri 113/2014 & Perbup 11/2019	Sistem membantu sinkronisasi standar pelaporan.	Transisi kelembagaan menghambat konsistensi awal.
(Asih & Adiputra, 2022)	Permendagri 20/2018	Struktur pencatatan konsisten meski anggaran berubah.	Perlunya adaptasi cepat parameter aplikasi terhadap kebijakan.
(Mardaw et al., 2022)	Permendagri 113/2014 & UU 6/2014	Format realisasi APBDes sesuai siklus regulasi.	Ketergantungan bimtek untuk input data non-rutin.
(Hasan et al., 2024)	SAP & Prinsip Pengelolaan Desa	Kualitas laporan bergantung pada prosedur teknis Siskeudes.	Teori transparansi belum selaras dengan kualitas teknis.
(Rahmah et al., 2020)	UU 6/2014 & Akuntabilitas Publik	Akuntabilitas hukum dan kebijakan sebagai dasar utama.	Transparansi laporan belum sinkron dengan standar publik.
(Armaida et al., 2024)	Prinsip Pengelolaan Desa	Disiplin akuntabilitas selaras dengan kualitas laporan.	Kurangnya pemahaman mendalam rincian transparansi.
(Pratiwi et al., 2022)	Prinsip & Standar Pelaporan Desa	Transparansi dan akuntabilitas meningkatkan kualitas laporan.	Celah integrasi masukan warga ke laporan teknis.
(Pamungkas et al., 2024)	Prinsip Akuntansi Sektor Publik	Akuntabilitas memperkuat kesesuaian standar penyajian.	Frekuensi audit internal yang belum konsisten.
(Tahir et al., 2020)	UU Desa & Prinsip Pelaporan Pemda	Korelasi positif transparansi terhadap kualitas informasi.	Variasi pengetahuan pimpinan terhadap regulasi dinamis

Akan tetapi, apabila dilihat dari sudut pandang akuntabilitas yang mengharuskan kesesuaian data dengan yang ada di lapangan, terdapat sejumlah ketimpangan yang cukup signifikan dalam pemenuhannya dengan kewajiban formal. melalui hasil yang disajikan oleh tabel 2 dapat dilihat jika sebagian besar desa masih menunjukkan ketidaksesuaian atau masih sulit untuk memenuhi kewajibannya. ketimpangan tersebut disebabkan oleh berbagai faktor yang pertama ialah, adanya kergantungan yang cenderung tinggi untuk bimbingan teknis penginputan data. kedua, pengoperasian sistem akuntansi yang cukup kompleks menjadi kendala bagi sebagian aparatur, sehingga menjadi permasalahan untuk menggunakan standar yang konsisten. dari berbagai permasalahan hingga dampak nya ini, dapat dikaji jika sistem pengelolaan yang baik tidak akan bisa terjalan dengan semestinta apabila masih terdapat pengguna teknis yang kurang memadai.

Akuntabilitas tentunya memerlukan adanya interaksi antar sistem dengan sebuah aparatur atau aktor yang akan menjalankannya, yang dimana artinya akuntabilitas tidak hanya menilai ketersediaan sistem pengelolaan tanpa adanya aktor yang menjalankan atau mengoperasikan sistem tersebut. terlebih lagi apabila sistem telah dibuat sedemikian rupa mendukung digitalisasi pelaporan keuangan, dari pihak pimpinan masih lemah akan adanya transparansi pada laporan keuangan dan sinkronisasi cenderung lemah, semuanya tidak akan berjalan sesuai dengan harapan yang dapat mewujudkan penyesuaian laporan keuangan yang terstandarisasi. dengan melemahnya transparansi dan kesadaran pimpinan, dampak buruknya akan berlaku pada kepercayaan Masyarakat.

Tabel 3.
Analisis Determinasi Faktor Dominan

Penulis & Tahun	Fokus Kompetensi (X1) Fokus	Fokus Sistem Pengelolaan (X2)	Faktor Paling Dominan	Alasan Teknis Akuntansi
(Halid et al., 2025)	Kapasitas SDM memahami regulasi & teknik akuntansi.	Efektivitas Siskeudes dalam akurasi pelaporan.	Interaksi Keduanya	Siskeudes hanya efektif jika dijalankan SDM berkompeten
(Aulia et al., 2026)	Kompetensi aparatur dalam perencanaan & pelaporan.	Mekanisme pengendalian formal (audit & sistem).	Kompetensi Moral	Tanpa integritas, sistem formal tidak efektif menekan fraud
(Temalagi et al., 2022)	Keahlian pemakai (user skills) & intensitas aplikasi.	Infrastruktur teknologi & kemudahan fitur aplikasi.	Kompetensi Aparatur	Kualitas informasi bergantung pada keahlian teknis pengguna
(Gusasi & Lantowa, 2021)	Kemampuan operasional & pemahaman alur tanggung jawab.	Siskeudes sebagai alat utama penatausahaan.	Sistem (Siskeudes)	Kedisiplinan aplikasi meningkatkan keteraturan laporan
(Bawansel et al., 2025)	Pelatihan berkelanjutan bagi kemahiran operator.	Siskeudes meminimalisir kesalahan input manual.	Sistem (Digitalisasi)	Otomatisasi mengurangi human error dalam penjurnalan
(Utami et al., 2023)	Kemampuan input data sesuai transaksi nyata.	Peran Siskeudes dalam percepatan pelaporan.	Sistem (Siskeudes)	Integrasi data otomatis meminimalisir keterlambatan laporan
(Elfirar & Putri, 2024)	Pemahaman operasional untuk ketepatan waktu input.	Siskeudes sebagai sarana pengelolaan siklus keuangan.	Sistem (Aplikasi)	Otomatisasi kunci perbaikan struktur pelaporan desa
(Asih & Adiputra, 2022)	Akurasi input data oleh Bendahara & Sekretaris.	Keandalan fitur Siskeudes mengolah data sistematis.	Sistem (Siskeudes)	Sistem memudahkan olah data kompleks menjadi laporan siap audit
(Mardaw et al., 2022)	Kemampuan olah data mentah menjadi informasi.	Keandalan Siskeudes menghasilkan laporan akurat.	Sistem (Siskeudes)	Efektivitas sistem membantu penyelesaian laporan sesuai standar
(Hasan et al., 2024)	Pengelolaan keuangan mandiri melalui alat digital.	Efektivitas fitur Siskeudes yang akurat & efisien.	Sistem (Siskeudes)	Implementasi aplikasi menjaga stabilitas kualitas laporan
(Rahmah et al., 2020)	Kualitas SDM & Komitmen Organisasi.	Prosedur pengelolaan keuangan administratif.	SDM & Komitmen	Tanpa kompetensi & komitmen, sistem tidak berjalan optimal
(Armaida et al., 2024)	Pertanggungjawaban dana desa secara terbuka.	Prosedur administrasi dari perencanaan ke pelaporan.	Akuntabilitas	Disiplin akuntabilitas memastikan laporan akurat & minim salah
(Pratiwi et al., 2022)	Pertanggungjawaban transaksi kepada publik.	Mekanisme transparansi (Baliho/Papan informasi).	Interaksi Sosial	Monitoring eksternal memaksa aparat bekerja teliti secara teknis
(Pamungkas et al., 2024)	Prinsip akuntansi & standar penyajian sektor publik.	Akuntabilitas sektor publik dalam kesesuaian standar.	Akuntabilitas	Audit internal diperlukan untuk konsistensi kepatuhan standar

(Tahir et al., 2020)	Pengetahuan Kades & pemahaman akuntabilitas.	Partisipasi masyarakat & transparansi informasi.	Kompetensi Pimpinan	Kebijakan Kades memastikan pelaporan memiliki logika akuntansi
-----------------------------	--	--	---------------------	--

Membahas keterkaitan faktor pendukung dan juga faktor yang dapat memperhambat proses dapat dilihat melalui tabel tiga. temuan menyajikan hasil jika adanya kemajuan dalam penyediaan sistem pengelolaan baik menggunakan siskeudes ataupun media digital lainnya menjadi sebuah faktor utama yang memberikan dampak besar sebab adanya upaya otomatisasi hingga data yang dapat secara langsung terintegrasi dari tahapan awal hingga menuju pelaporan. Dengan adanya kemudahan tersebut, biasanya penyusunan dilakukan secara manual yang dapat menyebabkan human error, dapat diminimalisir dengan adanya sistem yang mampu mempercepat proses penyusunan laporan dan menghasilkan laporan yang siap untuk dipertanggung jawabkan. dengan adanya berbagai fitur yang disediakan pada sistem, memuat keunggulan dalam sinkronisasi pelaporan, sehingga dapat mewujudkan stabilitas pada struktur pelaporan.

Selain itu, terdapat faktor yang menjadi penghambat dalam mewujudkan akuntabilitas propses pelaporan keuangan, faktor paling memberikan dampak signifikan pada keberlangsungan penggunaan siste adalah kompetensi aparatur, apabila aparatur tidak memiliki kompetensi yang memadai dalam mengoperasikan sistem, hal tersebut justru akan menjadi penghambat utama dalam pengelolaan. Lalu, temuan analisis menekankan jika keahlian secara teknis dan pemahaman alur logika akuntansi yang dimiliki pengguna atau bahkan pimpinan sangat mempengaruhi kualitas dari keluaran informasi akuntansi. Selain itu, faktor yang paling penting untuk diperhatikan ialah mengenai integritas. pengelolaan yang baik, dan juga berjalan dengan semestinya tidak akan pernah sempurna apabila tidak menjaga integritas sebagai landasan untuk meminimalisir kecurangan pelaporan, diindikasi apabila integritas tidak ditanamkan, maka semua upaya untuk mendukung kemajuan proses akuntabilitas tidak akan terlaksana. dua faktor ini merupakan temuan utama yang melandasi hambatan yang terjadi pada sejumlah desa yang menerapkan sistem. dari kedua jenis faktor, baik itu faktor pendukung dan juga penghambat, dapat diimplementasikan secara langsung guna untuk melakukan evaluasi terkait rangkaian pengoperasian evaluasi sistem. fakfor penghambat sebagai bahan evaluasi, dan faktor pendukung sebagai acuan untuk mendatangkan inovasi baru pada penerapan sistem.

Tabel 4.
Analisis Kualitas vs Formalitas Akuntabilitas

Penulis & Tahun	Bentuk Akuntabilitas Formal (Simbolis)	Bentuk Akuntabilitas Substansif (Kualitas)	Kesimpulan Kualitas	Masalah pada Transparansi
(Halid et al., 2025)	Publikasi APBDes agregat tanpa rincian realisasi.	Kontrol sosial dan evaluasi manfaat program oleh warga.	Formalitas Dominan	Budaya "sungkan" dan rendahnya literasi keuangan warga.
(Aulia et al., 2026)	Kepatuhan prosedural dan kelengkapan sistem pelaporan.	Internalisasi etika dan tanggung jawab moral publik.	Formalitas Dominan	Simbolis tanpa dukungan komitmen moral aparatur
(Temalagi et al., 2022)	Aplikasi sebagai alat percepatan penyelesaian laporan.	Akurasi informasi keuangan hasil optimalisasi sistem.	Formalitas Tinggi	Kendala teknis akses informasi dan literasi digital.
(Gusasi & Lantowa, 2021)	Pelaporan tepat waktu sesuai format Siskeudes.	Pertanggungjawaban jujur dan andal kepada publik.	Substansif Baik	Perlu penguatan kemudahan akses informasi warga
(Bawansel et al., 2025)	Ketersediaan cetakan laporan fisik dari Siskeudes.	Validitas data laporan yang akurat dan tepat waktu.	Substansif Meningkatkan	Fokus internal otoritas; akses warga awam terbatas

(Utami et al., 2023)	Kepatuhan prosedur penginputan data aplikasi.	Laporan andal mencerminkan penggunaan dana riil.	Substansif Baik	Dominasi pelaporan ke Kecamatan dibanding warga
(Elfirar & Putri, 2024)	Kelancaran aliran data nagari ke kecamatan.	Data keuangan dapat dipertanggungjawabkan per siklus.	Substansif Meningkatkan	Informasi sulit dipahami oleh masyarakat luas
(Asih & Adiputra, 2022)	Pemenuhan laporan fisik sesuai tenggat waktu.	Laporan akurat dan terpercaya bagi pihak eksternal.	Substansif Baik	Kendala infrastruktur (internet) hambat publikasi cepat
(Mardaw et al., 2022)	Kewajiban pelaporan Siskeudes ke Pemda.	Media penilaian kinerja aparat oleh masyarakat.	Substansif Baik	Detail teknis aplikasi belum sepenuhnya diakses warga
(Hasan et al., 2024)	Laporan rutin sebagai ketaatan administratif.	Pengaturan keuangan efisien dengan integritas data.	Substansif via Sistem	Transparansi tidak berpengaruh langsung pada kualitas.
(Rahmah et al., 2020)	Dokumentasi administratif proses dan program.	Pencapaian tujuan program berdampak nyata bagi desa.	Substansif via Komitmen	Pengaruh variabel transparansi paling kecil dibanding SDM
(Armaida et al., 2024)	Pemenuhan administratif pelaporan kepada otoritas.	Penyajian informasi jujur kepada publik.	Substansif Baik	Transparansi signifikan namun butuh akuntabilitas kuat
(Pratiwi et al., 2022)	Publikasi laporan keuangan fisik di area publik.	Peningkatan kualitas informasi melalui pengawasan warga.	Substansif Meningkatkan	Keterlibatan masyarakat dalam pengawasan belum optimal.
(Pamungkas et al., 2024)	Pemenuhan kewajiban administratif desa.	Laporan transparan dan dapat diuji kebenarannya.	Substansif Terjaga	Tanpa audit, akuntabilitas berisiko sekadar formalitas
(Tahir et al., 2020)	Prosedur pertanggungjawaban dana desa.	Informasi relevan, andal, dan dapat dibandingkan.	Substansif Baik	Data publikasi seringkali hanya angka tanpa makna kinerja

Melalui praktik akuntabilitas keuangan desa yang kebanyakan diterapkan dimasa sekarang, pada sajian tabel empat didapatkan temuan jika masih terdapat sejumlah ketimpangan antara upaya pemenuhan laporan keuangan sebagai kebutuhan formalitas, dan laporan keuangan sebagai informasi yang konkrit secara nyata sesuai dengan kondisi yang berlaku. ketimpangan yang terjadi dikarenakan adanya perbedaan hasil antara sejumlah desa yang cukup signifikan dalam pengelolaan laporan keuangan menggunakan sistem yang terdigitalisasi. penyajian pada tabel empat memperoleh hasil jika sebagian desa telah mencapai akuntabilitas secara formal atau memang benar-benar digunakan dan disajikan sesuai fakta, yang dimana dibuktikan dengan ketepatan waktu pengumpulan laporan, kesesuaian format dengan sistem keuangan desa, serta adanya keluaran berbentuk fisik dan secara digital yang di publikasikan pada APBDES. sebaliknya, sebagian aparat desa gagal dalam memenuhi kewajiban administratif yang dipengaruhi oleh beberapa faktor yang menghambat proses pelaporan serta tidak dapat menyelesaikan tuntutan otoritas lainnya yang cenderung lebih tinggi yang berasal dari pemerintah daerah ataupun kecamatan.

Dalam mewujudkan akuntabilitas pelaporan keuangan yang dilandasi dengan integritas, diperlukannya kesadaran dalam komitmen moral serta pengawasan yang terkoordinasi dengan baik dan dilakukan secara berkala. melalui kesadaran tersebut, dampak yang baik akan dirasakan pula oleh masyarakat, karena masyarakat akan sangat mendukung dan menjunjung tinggi transparansi yang disajikan melalui laporan keuangan daerah. Akan tetapi, sebagian orang yang masih awam dengan teknologi, sehingga merasa kesulitan dalam

mengoperasikan layanan untuk melihat publikasi laporan keuangan juga menjadi penghambat untuk mewujudkan transparansi laporan keuangan. Dari berbagai keberhasilan dan juga kegagalan yang disajikan, hal ini membuktikan jika untuk mewujudkan sistem pengelolaan yang ter integrasi dan juga transparansi pelaporan keuangan tidak hanya melibatkan satu variabel saja, banyak sekali variabel yang menjadi peran utama bahkan faktor pendukung yang bisa mewujudkan akuntabilitas pelaporan keuangan. dengan demikian, keluaran pelaporan keuangan yang baik, tidak hanya bergantung pada sistem yang melatar belakangi prosesnya, namun tetap membutuhkan dukungan berbagai pihak yang dapat mendukung berlangsungnya proses pelaporan keuangan.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa kemampuan sumber daya manusia dan keandalan sistem manajemen digital memainkan peran penting dalam menentukan akuntabilitas keuangan desa di Indonesia, berdasarkan temuan evaluasi literatur komprehensif terhadap lima belas studi ilmiah. Disiplin administrasi dan keseragaman standar akuntansi dalam pelaporan keuangan desa telah ditingkatkan secara efektif melalui penerapan teknis aplikasi Siskeudes. Namun, efisiensi sistem tersebut masih dibatasi oleh kompetensi pejabat, yang umumnya memandang akuntabilitas tidak lebih dari sekadar pelaksanaan formalitas simbolis untuk memenuhi kewajiban kepada otoritas yang lebih tinggi. Akuntabilitas substantif hanya dapat dicapai jika teknologi digunakan bersamaan dengan pengetahuan keuangan yang memadai, dedikasi organisasi, dan integritas moral pejabat untuk mengurangi kemungkinan manipulasi data. Selain itu, ketidakmampuan masyarakat saat ini untuk mengakses atau memahami informasi keuangan dengan benar menjadikan transparansi sebagai hambatan yang signifikan.

Sebagai saran praktis, pemerintah daerah sebaiknya meningkatkan frekuensi pelatihan akuntansi teknis yang menekankan pemahaman atas prinsip-prinsip akuntansi substantif, selain pengoperasian perangkat lunak. Untuk mengubah paradigma akuntabilitas dari sekadar pelaporan administratif menjadi alat kontrol sosial yang konkret, sangatlah penting untuk memperkuat fungsi audit internal dan mengoptimalkan saluran transparansi yang lebih ramah pengguna bagi warga desa. Disarankan agar dilakukan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui apakah partisipasi masyarakat yang kuat dalam pengawasan digital secara langsung dapat mengurangi prevalensi penyalahgunaan dana desa.

REFERENSI

- Ardelia, S. N., & Handayani, N. (2022). PENGARUH AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA SERTA PARTISIPASI MASYARAKAT TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 11(4), 2–16.
- Armaida, S. G., Usdeldi, & Siregar, E. S. (2024). Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Dana Desa Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Desa (Studi Pada Desa Pematang Lingkung, Kecamatan Batang Merangin, Kabupaten Kerinci). *Jurnal Anggaran : Jurnal Publikasi Ekonomi Dan Akuntansi*, 2(2), 01–20. <https://doi.org/doi.org/10.61132/anggaran.v2i2.446>
- Asih, K. G., & Adiputra, I. M. P. (2022). ANALISIS PENERAPAN APLIKASI SISTEM KEUANGAN DESA (SISKEUDES) VERSI 2.0.3 DALAM MENINGKATKAN KUALITAS AKUNTABILITAS KEUANGAN DESA PADA MASA PANDEMI COVID-19 (Studi Pada Desa Kalibukbuk, Kec. Buleleng, Bali). *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Universitas*, 13(1), 12–23.
- Aulia, N., Burrohman, M., & Rochmatullah, M. R. (2026). Integrasi Nilai Religius dan Teori

- Agensi dalam Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Indonesia: Sebuah Kajian Sistematis (Systematic Literature Review 2015-2025). *Owner: Riset & Jurnal Akuntansi*, 10(1), 301–314. <https://doi.org/doi.org/10.33395/owner.v10i1.2958>
- Bawansel, G. I., Walandouw, S. K., & Sardjono, O. Y. M. (2025). Analisis peran sistem keuangan desa (Siskeudes) dalam meningkatkan akuntabilitas keuangan desa: Studi kasus Desa Komus II Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. *Riset Akuntansi Dan Portofolio Investasi*, 3(2), 570–580. <https://doi.org/10.58784/rapi.405>
- Elfirar, I., & Putri, N. E. (2024). Penerapan Penggunaan Aplikasi Siskeudes dalam Upaya Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Desa di Nagari Selayo. *Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa (Village)*, 05(01), 1–11. <https://doi.org/doi.org/10.47134/villages.v5i1.90>
- Gusasi, S. A., & Lantowa, F. D. (2021). Analisis penerapan aplikasi siskeudes dalam meningkatkan kualitas akuntabilitas keuangan desa di desa huyula. *JSAP: Journal Syariah and Accounting Public*, 4(1), 15–23. <https://doi.org/10.31314/jsap.4.1.15-23.2021>
- Halid, F., Amaliah, T. H., & Mahdalena. (2025). Akuntabilitas dan Transparansi Keuangan Desa: Sintesis Tematik Literatur. *Jurnal Studi Ekonomi Dan Bisnis Islam (SEBI)*, 7(2), 199–208.
- Handiyono, V. J., & Lutfi, A. (2020). PENERAPAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PENGELOLAAN DANA DESA TAHUN 2018 (DESA TAMBUN DAN DESA SEGARAJAYA). *DINAMIKA GOVERNANCE: JURNAL ILMU ADMINISTRASI NEGARA*, 10(2), 101–119.
- Hasan, N. I., Adila, S., & Ridwan, R. (2024). PENGARUH IMPLEMENTASI APLIKASI SISTEM KEUANGAN DESA DAN TRANSPARANSI TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DESA KARSAMENAK. *Jurnal Neraca Peradaban*, 4(3), 2019–2028.
- Kahale, L. A., Elkhoury, R., Mikati, I. El, Pardo-hernandez, H., Khamis, A. M., Schünemann, H. J., Haddaway, N. R., & Akl, E. A. (2021). PRISMA flow diagrams for living systematic reviews: a methodological survey and a proposal. *F1000 Research*, 10(192), 1–11.
- Mardaw, M., Mawardi, M. C., & Anwar, S. A. (2022). EFEKTIVITAS PENERAPAN APLIKASI SISTEM KEUANGAN DESA (SISKEUDES) DALAM MENINGKATKAN AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI LAPORAN KEUANGAN DESA GRATI KECAMATAN SUMBERSUKO KABUPATEN LUMAJANG. *E-JRA*, 11(08), 39–46.
- Pamungkas, G., Puri, P. A., & Yanto, D. (2024). Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi , Keuangan & Bisnis Syariah Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi , Keuangan & Bisnis Syariah. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 6(3), 3521–3533. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v6i3.5149>
- Pramesti, T. B., Nuraina, E., & Sulistyowati, N. W. (2023). EVALUASI IMPLEMENTASI SISTEM KEUANGAN DESA (SISKEUDES). *Jurnal Akuntansi, Keuangan, Perpajakan Dan Tata Kelola Perusahaan (JAKPT)*, 1(2), 293–300.
- Pratiwi, N. R., Diana, N., & Junaidi. (2022). PENGARUH TRANSPARANSI, AKUNTABILITAS DAN PARTISIPASI MASYARAKAT TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN DESA DI KECAMATAN GONDANG KABUPATEN NGANJUK. *E-JRA*, 11(05), 92–108.
- Puspa, D. F., & Prasetyo, R. A. (2020). PENGARUH KOMPETENSI PEMERINTAH DESA, SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL, DAN AKSESIBILITAS LAPORAN KEUANGAN TERHADAP AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA. *Media Riset Akuntansi, Auditing & Informasi*, 20(2), 281–297.

- <https://doi.org/doi.org/10.25105/mraai.v20i2.7894>
- Rahmah, A., Rasuli, M., & Supriono. (2020). PENGARUH AKUNTABILITAS PUBLIK, TRANSPARANSI LAPORAN KEUANGAN, KOMITMEN ORGANISASI DAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA TERHADAP PENGELOLAAN KEUANGAN DESA. *JOM FEB*, 7(1), 1–15.
- Rahmasari, B. (2020). Pengelolaan Keuangan Desa Ditinjau Dari Undang- Undang Desa Menuju Masyarakat Yang Mandiri. *Lex Renaissance*, 5(2), 488–507.
- Saputra, R. H., & Novitasari, D. (2025). Analisis Efisiensi Struktur Data pada Implementasi SISKEUDES : Studi Kasus Pekon Gunung Kasih. *Simpatik: Jurnal Sistem Informasi Dan Informatika*, 5(2), 123–131.
- Simamora, S. C., Gaffar, V., & Arief, M. (2024). SYSTEMATIC LITERATUR REVIEW DENGAN METODE PRISMA: DAMPAK TEKNOLOGI BLOCKCHAIN TERHADAP PERIKLANAN DIGITAL. *Jurnal Ilmiah M-Progress*, 14(1), 1–11.
- Tahir, S. Y., Malia, E., & Faisol, I. A. (2020). PENGARUH AKUNTABILITAS, PARTISIPASI MASYARAKAT, PENGETAHUAN KEPALA DESA, DAN TRANSPARANSI TERHADAP KUALITAS INFORMASI LAPORAN KEUANGAN DESA DI KABUPATEN PAMEKASAN. *Journal of Accounting and Financial Issue*, 1(1), 20–29.
- Temalagi, S., Silooy, M., Pattinaja, E. M., & Haryadi, D. (2022). Implementation of Village Apparatus Financial Accounting Applications : Challenges and Opportunities. *Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal)*, 5(1), 6849–6860. <https://doi.org/doi.org/10.33258/birci.v5i1.4409>
- Utami, O. P., Agustin, E., & Priyono, N. (2023). Analisis Penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) Dalam Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Desa Di Desa Karangrejo Kecamatan Selomerto. *Jurnal Mutiara Ilmu Akuntansi (JUMIA)*, 1(3), 65–75.